

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amalia, N. (2012). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Apriyanti, R. (2021). *Force Majeure In Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum Kerja*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.S, S. (2008). *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Husni, L. (2007). *Hubungan Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Pt Grafindo Persada.
- Irsan, k., & Armansyah. (2016). *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kesehatan, K. (2010). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease*. Kementerian Kesehatan.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya.
- Muhshi, Adam.(2015). *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta, LKiS Pelangi Aksara.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo. Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum (Cetakan ke V)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- S. Rahmat. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: National Legal Reform Program.

- Septiana, S. H. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, K. O. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Bardon.
- Subagio, A. (2021). *Pembelajaran Digital Covid-19*. Bandung: Widhina Bakti Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sunyoto, Danang (2013). *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Suratman. (2019). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Suwiryo, B. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Wijayanti, A. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wira, N. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

B. Jurnal

- Cahyono, J. Force Majeure Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Vol. 4 No. 1. Surabaya: Universitas Kartini Surabaya. 2021.
- Dian, Anisa. "Pandemi Corona sebagai Alasan Force Majeure dalam Suatu Kontrak Bisnis". *E-Jurnal: Supremasi Hukum*. Vol. 9 No.1. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2020.
- Exachell, A. Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.8 No. 3. Surabaya: Universitas Surabaya. 2020.

Febrianto, R., & Herawati, R. Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 No. 1. Semarang: Universitas Diponegoro. 2021.

Hartono, S. I. Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Bina Sarana Informatika*, 18. Jakarta: Universitas Bina Darma. 2020.

Ibrani, G. V. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Terdampak Pandemi COVID-19 atas Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. *JURNAL: LEX PRIVATUM*, Vol. 9 No. 12. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2021.

Mustakim. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 7 No. 8. Jakarta: Universitas Negeri Islam Jakarta. 2020

Ramdani, R. F. Apakah Perusahaan Sub Sektor Retail di Indonesia Berpotensi Bangkrut di era Pandemi Covid-19? *Activa Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 6 No. 2. Malang: Universitas Islam Raden Rahmat. 2021.

Randi. Yusuf. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal: Yurisprudensi*, Vol.3 No.2. Malang: Universitas Malang. 2020.

Sukur, M. H. Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Inico Legis*, Vol. 1 No. 1. Madura: Universitas Trunojoyo Madura. 2020

Susilo. Adityo, "Corona Virus Disease 2019: Tinjau Literatur Terkini", *Jurnal: Penyakit Dalam*. Vol. 7 No. 1. Jakarta: Universitas Indonesia. 2020.

Thorik, S. H. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19. *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1. Jakarta: Universitas Negeri Islam Jakarta. 2020.

Tristanto, A. Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Jurnal Universitas Andalas*, Vol. 6 No. 3. Padang: Universitas Andalas. 2020.

C. Berita

Bagia, K. (24 agustus 2021). *Sejak Awal Tahun 2021, 50 Ribu Buruh Kena PHK Akibat Pandemi. SINDONEWS.*

Fadli, R. (16 JUNI 2021). Kenali Varian Alpha, Beta dan Delta dari Virus COVID-19. *Halodoc.*

Januar, M. (2020, april 23). Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona. *Hukum Online.*

Kurniawan, D. (2021, agustus 4). Perlahan Bangkit dari Kehancuran Karena Pandemi, Ramayana Raup Pendapatan Rp1,72 Triliun dan Laba Rp137 Miliar di Semester I 2021. *Voi.id.*

Salah, T. (2020, Maret 27). Ramayana PHK 421 Pegawai, 2.700 Terkena Pemotongan Gaji. *CNBC INDONESIA*

TV, J. (2020, april 17). Momok PHK Ditengah Pandemi Covid-19. *Jambi TV.*

Yuliana. (20 April 2020). Update Corona Global: 2,1 juta Terinfeksi, 546 Ribu Sembuh. *CNN INDONESIA.*

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. UU Nomor 11 Tahun 2020.

Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003.

Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana. UU Nomor 24 Tahun 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PP Nomor 1 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP Nomor 21 Tahun 2020.

Keputusan Presiden Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). KEPPRES Nomor 7 Tahun 2020.

Keputusan Presiden Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 perihal pengujian materi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.